



**REKAPITULASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PUBLIK NEGARA**

No	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persentase (%)
1	Kementerian	34	34	100,00%
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	129	41	31,78%
3	Provinsi	34	30	88,24%
4	Kabupaten	399	168	42,11%
5	Kota	98	60	61,22%
	TOTAL	694	333	47,98%

Sumber : Dit.Komunikasi Publik - Ditjen IKP, 1 Juli 2014

DAFTAR PPID KEMENTERIAN

NO	KEMENTERIAN	NO SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	Kominfo	117/KEP/M.Kominfo/03/2010	23 Maret 2010
2.	Koord. Bidang Polhukam	SKEP.299/SES/POLHUKAM/05/2010	tgl 27 Mei 2010
3.	Kesehatan	1625/MENKES/SK/VIII/2011	1 Agustus 2011
4.	Hukum dan HAM	M.HH-01.IN.01.03 TH.2010	17 Juni 2010
5.	Kebudayaan dan Pariwisata	KM.70/OT.001/MKP/2010	25 Agustus 2010
6.	Pendidikan Nasional	094/P/2010	6 September 2010
7.	Perhubungan	72 Tahun 2010	18 Nopember 2010
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31 Tahun 2011	
9.	Kehutanan	SK.50/Menhut-II/2011	22 Februari 2011
10.	Koordinator Bidang Kesra	17 Tahun 2011	10 Maret 2011
11.	Luar Negeri	20/B/KP/III/2011/01	28 Maret 2011
12.	Perdagangan	346/M-DAG/KEP/4/2011	5 April 2011
13.	Sosial	54/HUK/2011	26 April 2011
14.	Pertanian	2634/Kpts/OT.160/5/2011	27 Mei 2011
15.	Pekerjaan Umum	156/KPTS/M/2011	17 Juni 2011
16.	Perindustrian	351/M-IND/Kep/7/2011	25 Juli 2011
17.	Pertahanan	KEP/614/M/VIII/2011	15 Agustus 2011
18.	Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	218/MEN/VIII/2011	19 Agustus 2011
19.	Keuangan	ST- 2736 /MK.1/2011	9 Agustus 2011
20.	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	28/KEP/M.KUKM/VIII/2011	11 Agustus 2011

21.	Pembangunan Daerah Tertinggal	319/KEP/M.PDT/VIII/2011	16 Agustus 2011
22.	Sekretaris Negara	130 Tahun 2011	31 Mei 2011
23.	Negara Riset dan Teknologi	235/M/Kp/VII/2011	29 Juli 2011
24.	Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	KEP.80/M.PPN/HK/08/2011	16 Agustus 2011
25.	Energi dan Sumber Daya Mineral	: 0106 K/73/MEM/2012	13 Januari 2012
26.	Negara Badan Usaha Milik Negara	SK-18/MBU/WK/2012	28 Februari 2012
27.	Pemuda dan Olahraga	0001-E Tahun 2012	26 Januari 2012
28.	Negara Lingkungan Hidup	222 Tahun 2011	31 Oktober 2011
29.	PAN dan RB	220 Tahun 2012	31 Juli 2012
30.	Koordinator Bidang Perekonomian	KEP-61/M.EKON/08/2012	9 Agustus 2012
31.	Dalam Negeri	480.05-641 Tahun 2012	14 September 2012
32.	Perumahan Rakyat	111 Tahun 2012	3 September 2012
33.	Kelautan dan perikanan	KEP.36/MEN/2012	27 September 2012
34.	Agama	200 Tahun 2012	18 Desember 2012

DAFTAR PPID LEMBAGA NEGARA / LPNK/LNS/LPP

NO	LEMBAGA TINGGI NEGARA	NOMOR SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	MPR - RI		
2.	DPR - RI	867/SEKJEN/2010	24 Mei 2010
3.	DPD - RI	220B Tahun 2010	19 Juni 2010
4.	MA - RI	1-144/KMA/SK/I/2011	5 Januari 2011
5.	MK - RI	228.6/KEP/SET.MK/2011	3 Januari 2011
6.	BPK - RI	430/K/X.XIII.2/11/2011	7 November 2011
NO	LEMBAGA NEGARA	NOMOR SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	Kejaksaan Agung RI	062/A/JA/05/2010	14 Mei 2010
2.	Kepolisian RI	Sprin/133/I/2010	26 Januari 2010
3.	TNI	Kep/611/VII/2011	29 Juli 2011
4.	Sekretaris Kabinet	19 Tahun 2013	1 Maret 2013
NO	L P N K	NOMOR SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	Arsip Nasional (ANRI)	HK.01/141/2010	1 Desember 2010
2.	Badan Inteligen Negara	KEP.123/VIII/2011	5 Agustus 2011
3.	Badan Kepegawaian Negara	136/KEP/2011	25 Juli 2011
4.	BKKBN	Peraturan Kepala BKKBN No : 136/PER/D2/2011	11 Mei 2011
5.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	50 Tahun 2011	18 Agustus 2011
6.	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional		
7.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	SK.47/UM.501/KB/BMKG-2011	23 Agustus 2011
8.	Badan Narkotika Nasional		
9.	Badan Nasional Penanggulangan	SK. 153/BNPB/VIII/2011	25 Agustus 2011

	Bencana (BNPB)		
10.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
11.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	56/KA-BNP2TKI/VIII/2011	19 Agustus 2011
12.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	KEP-903/K/SU/2010	30 September 2010
13.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir		
14.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011	22 Agustus 2011
15.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	273 Tahun 2010	30 Agustus 2010
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	KEP.80/M.PPN/HK/08/2011	16 Agustus 2011
17.	Badan Pertanahan Nasional	177/KEP-100.7.1/IV/2012	25 April 2012
18.	Badan Pusat Statistik	239 Tahun 2011	6 Juli 2011
19.	Badan SAR Nasional		
20.	Badan Standardisasi Nasional	128/KEP/BSN/8/2011	4 Agustus 2011
21.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	148/KA/VII/2010	21 Juli 2010
22.	Lembaga Administrasi Negara	35/K.I/HKM.03.02/2014	14 Februari 2014
23.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	298/A/2011	9 Februari 2011
24.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	134 Tahun 2011	1 Agustus 2011
25.	Lembaga Ketahanan Nasional	16 Tahun 2013	5 Februari 2013
26.	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	211 Tahun 2011	25 Mei 2011
27.	Lembaga Sandi Negara	Peraturan No ; 02 Tahun 2011	22 Agustus 2011
28.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	126 Tahun 2013	12 November 2013
NO	LSN (LEMBAGA NON STRUKTURAL)	NOMOR SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia		
2.	Badan Amil Zakat Nasional		
3.	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional		
4.	Badan Koordinasi Keamanan Laut		
5.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional		
6.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		
7.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi		
8.	Badan Olahraga Profesional		
9.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal		
10.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		
11.	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
12.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas		

13.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik		
14.	Badan Pengawas Pemilihan Umum		
15.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat		
16.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu		
17.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura		
18.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	241 Tahun 2013	2 Januari 2013
19.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan		
20.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun		
21.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang		
22.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional		
23.	Badan Pertimbangan Kepegawaian		
24.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional		
25.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional		
26.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan		
27.	Dewan Buku Nasional		
28.	Dewan Energi Nasional		
29.	Dewan Gula Nasional		
30.	Dewan Jaminan Sosial Nasional		
31.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		
32.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan		
33.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun		
34.	Dewan Kelautan Indonesia		
35.	Dewan Ketahanan Pangan		
36.	Dewan Koperasi Indonesia		
37.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus		
38.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		
39.	Dewan Nasional Perubahan Iklim		
40.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional		
41.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia		
42.	Dewan Pengupahan Nasional		
43.	Dewan Pers		

44.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah		
45.	Dewan Pertimbangan Presiden		
46.	Dewan Riset Nasional		
47.	Dewan Sumber Daya Air Nasional		
48.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional		
49.	Komisi Banding Merek		
50.	Komisi Banding Paten		
51.	Komisi Hukum Nasional		
52.	Komisi Informasi Pusat	04/KIPXII/2010	6 Desember 2010
53.	Komisi Kejaksaan		
54.	Komisi Kepolisian Nasional		
55.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan		
56.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia		
57.	Komisi Nasional Lanjut Usia		
58.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	KEP-224/01/05/2010	26 Mei 2010
59.	Komisi Pemilihan Umum	Peraturan KPU 23 Tahun 2010	
60.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional		
61.	Komisi Pengawas Haji Indonesia		
62.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha		
63.	Komisi Penyiaran Indonesia		
64.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	SK 03/KPAI/VI/2011	17 Juni 2011
65.	Komite Akreditasi Nasional		
66.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak		
67.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan		
68.	Komite Inovasi Nasional		
69.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur		
70.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi		
71.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza		
72.	Komite Olah Raga Nasional Indonesia		
73.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun		
74.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan		
75.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah		
76.	Komite Standar Nasional untuk		

	Satuan Ukuran		
77.	Konsil Kedokteran Indonesia		
78.	Lembaga Kerja Sama Tripartit		
79.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat		
80.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban		
81.	Lembaga Produktivitas Nasional		
82.	Lembaga Sensor Film		
83.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan		
84.	Ombudsman	32 a/ORI-SK/III/Tahun 2012	1 Maret 2012
85.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kep.68/1.01/PPATK/06/2011	5 Juli 2011
86.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		
87.	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP- 4)	33 Tahun 2011	31 Maret 2011
NO	L P P (Lembaga Penyiaran Publik)	NOMOR SK PPID	TANGGAL SK PPID
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia		
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia		

DAFTAR PPID PROVINSI DAN KAB./KOTA

No	Provinsi		Kab./Kota	NO SK PPID	TGL SK PPID
1.	Aceh			480/590/2010	27 September 2010
		1.	Kab. Aceh Barat	728 Tahun 2013	18 Oktober 2013
		2.	Kab. Aceh Barat Daya	555/409/2013	1 Oktober 2013
		3.	Kab. Aceh Besar		
		4.	Kab. Aceh Jaya	112. C Tahun 2011	4 Oktober 2011
		5.	Kab. Aceh Selatan	501 Tahun 2013	1 Agustus 2013
		6.	Kab. Aceh Singkil	138 Tahun 2013	19 Juli 2013
		7.	Kab. Aceh Tamiang		
		8.	Kab. Aceh Tengah	480/545/DISHUBKOMINF O/2013	28 Juni 2013
		9.	Kab. Aceh Tenggara	180/161/2012	30 Juni 2012
		10.	Kab. Aceh Timur	550/710/2011	20 Desember 2011
		11.	Kab. Aceh Utara	0.16.1/10/2013	20 Juni 2013
		12.	Kab. Bener Meriah	188.45/645/SK/2012	26 Desember 2012
		13.	Kab. Bireuen	602 Tahun 2013	12 November 2013
		14.	Kab. Gayo Lues		
		15.	Kab. Nagan Raya		
		16.	Kab. Pidie	404 Tahun 2013	2 September 2013
		17.	Kab. Pidie Jaya	313 Tahun 2012	27 September 2012
		18.	Kab. Simeulue	210 Tahun 2012	11 Juni 2012
		19.	Kota Banda Aceh	260 Tahun 2012	7 Agustus 2012
		20.	Kota Langsa	503/042/2013	10 September 2013
		21.	Kota Lhokseumawe	430 Tahun 2012	28 Juni 2012
		22.	Kota Sabang	042/467/2013	25 September 2013
		23.	Kota Subulussalam	188.45/065/2011	8 September 2011
2	Sumatera Utara			188.44/292/KPTS/2014	17 April 2014
		1.	Kab. Asahan		
		2.	Kab. Batubara		
		3.	Kab. Dairi		
		4.	Kab. Deli Serdang		
		5.	Kab. Humbang Hasundutan		
		6.	Kab. Karo	17 Tahun 2011	9 September 2011
		7.	Kab. Labuhanbatu		
		8.	Kab. Labuhanbatu Selatan		
		9.	Kab. Labuhanbatu Utara		
		10.	Kab. Langkat	821.29/2920	22 Maret 2011

		11.	Kab. Mandailing Natal		
		12.	Kab. Nias		
		13.	Kab. Nias Barat		
		14.	Kab. Nias Selatan		
		15.	Kab. Nias Utara		
		16.	Kab. Padang Lawas		
		17.	Kab. Padang Lawas Utara		
		18.	Kab. Pakpak Bharat	482 Tahun 2013	6 Nopember 2013
		19.	Kab. Samosir	177 Tahun 2012	15 Agustus 2012
		20.	Kab. Serdang Bedagai	71/060/Tahun 2011	14 Februari 2011
		21.	Kab. Simalungun		
		22.	Kab. Tapanuli Selatan		
		23.	Kab. Tapanuli Tengah		
		24.	Kab. Tapanuli Utara		
		25.	Kab. Toba Samosir	149 Tahun 2012	. 2 Mei 2012
		26.	Kota Binjai		
		27.	Kota Gunungsitoli		
		28.	Kota Medan	482/091.K/2012	2 Januari 2012
		29.	Kota Padangsidempuan		
		30.	Kota Pematangsiantar		
		31.	Kota Sibolga		
		32.	Kota Tanjungbalai		
		33.	Kota Tebing Tinggi		
3	Sumatera Barat			489-332-2012	16 April 2012
		1.	Kab. Agam		
		2.	Kab. Dharmasraya		
		3.	Kab. Kepulauan Mentawai		
		4.	Kab. Lima Puluh Kota		
		5.	Kab. Padang Pariaman	152/KEP/BPP/2013	28 Juni 2013
		6.	Kab. Pasaman		
		7.	Kab. Pasaman Barat		
		8.	Kab. Pesisir Selatan		
		9.	Kab. Sijunjung		
		10.	Kab. Solok		
		11.	Kab. Solok Selatan		
		12.	Kab. Tanah Datar	555/312/DISHUBKOMINF O-2012	27 Agustus 2012
		13.	Kota Bukittinggi	188.45-173-2014	5 Mei 2014
		14.	Kota Padang	237 Tahun 2013	7 Oktober 2013
		15.	Kota Padangpanjang		
		16.	Kota Pariaman		
		17.	Kota Payakumbuh		
		18.	Kota Sawahlunto		
		19.	Kota Solok		

4	Riau			909/VIII/2011	24 Agustus 2011
		1.	Kab. Bengkalis		
		2.	Kab. Indragiri Hilir		
		3.	Kab. Indragiri Hulu	279 Tahun 2011	20 Agustus 2011
		4.	Kab. Kampar		
		5.	Kab. Kuantan Singingi		
		6.	Kab. Pelalawan	KPTS.550/DISHUBKOMIN FO/2013/776	30 Desember 2013
		7.	Kab. Rokan Hilir		
		8.	Kab. Rokan Hulu		
		9.	Kab. Siak		
		10.	Kab. Kepulauan Meranti	53.1 Tahun 2012	21 Maret 2012
		11.	Kota Dumai		
		12.	Kota Pekanbaru		
5	Kep.Riau			336Tahun 2011	2 Agustus 2011
		1.	Kab. Bintan		
		2.	Kab. Karimun		
		3.	Kab. Kepulauan Anambas		
		4.	Kab. Lingga	424/KPTS/XI/2013	29 November 2013
		5.	Kab. Natuna		
		6.	Kota Batam	KPTS.218/HK/IV/2012	24 April 2012
		7.	Kota Tanjung Pinang		
6	Jambi			474/Kep.Gub/HMP/2011	11 September 2011
		1.	Kab. Batanghari		
		2.	Kab. Bungo		
		3.	Kab. Kerinci		
		4.	Kab. Merangin		
		5.	Kab. Muaro Jambi		
		6.	Kab. Sarolangun		
		7.	Kab. Tanjung Jabung Barat		
		8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	103 Tahun 2012	7 Februari 2012
		9.	Kab. Tebo		
		10.	Kota Jambi		

		11.	Kota Sungai Penuh		
7	Bangka Belitung			188.44/551m/VII/2013	12 Juni 2013
		1.	Kab. Bangka	188.45/658/IX/2011	12 Agustus 2011
		2.	Kab. Belitung		
		3.	Kab. Bangka Barat		
		4.	Kab. Bangka Tengah		
		5.	Kab. Bangka Selatan	188.45/236/V/2011	16 Agustus 2011
		6.	Kab. Belitung Timur		
		7.	Kota Pangkal Pinang	110 Tahun 2011	24 Februari 2011
8	Bengkulu			B.337.XV Tahun 2013	12 September 2013
		1.	Kab. Bengkulu Selatan	480/102 Tahun 2012	15 Februari 2012
		2.	Kab. Bengkulu Tengah		
		3.	Kab. Bengkulu Utara		
		4.	Kab. Kaur		
		5.	Kab. Kepahiang	377 Tahun 2011	3-10-2011
		6.	Kab. Lebong		
		7.	Kab. Mukomuko		
		8.	Kab. Rajang Lebong		
		9.	Kab. Seluma		
		10.	Kota Bengkulu		
9	Sumatera Selatan			133/KPTS/DISHUBKO MINFO/2010	29 Januari 2010
		1.	Kab. Banyuasin	547 Tahun 2011	5 Agustus 2011
		2.	Kab. Empat Lawang		
		3.	Kab. Lahat		
		4.	Kab. Muara Enim		
		5.	Kab. Musi Banyuasin		
		6.	Kab. Musi Rawas		
		7.	Kab. Ogan Ilir		
		8.	Kab. Ogan Komering Ilir		
		9.	Kab. Ogan Komering Ulu	257/KPTS/XIX/2011	25 Agustus 2011
		10.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		
		11.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		
		12.	Kota Lubuklinggau		

		13.	Kota Pagar Alam	217 Tahun 2013	26 Agustus 2013
		14.	Kota Palembang	150 Tahun 2011	8 Maret 2011
		15.	Kota Prabumulih		
10	Lampung			G/238/III 07/HK/2010	14 April 2010
		1.	Kab. Lampung Barat		
		2.	Kab. Lampung Selatan	B/194/III.07/HK/2013	9 Januari 2013
		3.	Kab. Lampung Tengah		
		4.	Kab. Lampung Timur		
		5.	Kab. Lampung Utara	042/363/33-VI/2011	23 Juni 2011
		6.	Kab. Mesuji		
		7.	Kab. Pesawaran		
		8.	Kab. Pringsewu	B/178/KPTS/D.06/2011	22 Agustus 2011
		9.	Kab. Tanggamus		
		10.	Kab. Tulang Bawang	B/202/II.15/HK/TB/2010	28 Juni 2010
		11.	Kab. Tulang Bawang Barat		
		12.	Kab. Way Kanan		
		13.	Kota Bandar Lampung	260/IV.31/HK/2013	26 Februari 2013
		14.	Kota Metro	Surat Perintah No: 489/35/SETDA/03/2012	28 Februari 2012
11	Jawa Barat			489/Kep.487-Diskominfo/2010	18 Maret 2010
		1.	Kab. Bandung	487/Kep.370-BAPASI/2011	28 Oktober 2011
		2.	Kab. Bandung Barat	800/Kep.336-Dishubkominfo/2013	22 April 2013
		3.	Kab. Bekasi	480/Kep.448-A-Humas/X/2010	18 Oktober 2010
		4.	Kab. Bogor	550/357/Kpts/Per-UU/2011	6 Agustus 2011
		5.	Kab. Ciamis	555/Kpts.537-Huk/2011	10 Agustus 2011
		6.	Kab. Cianjur		
		7.	Kab. Cirebon	042/KEP.536-Diskominfo/2011	4 Oktber 2011
		8.	Kab. Garut	042/Kep.483-ORTALA/2011	10 Agustus 2011
		9.	Kab. Indramayu		
		10.	Kab. Karawang		
		11.	Kab. Kuningan		
		12.	Kab. Majalengka	Draft	
		13.	Kab. Purwakarta	042/Kep.279-Ortala/2012	5 Maret 2012
		14.	Kab. Subang	487/Kep.448.A-Diskominfo/2011	26 Agustus 2011
		15.	Kab. Sukabumi	487/Kep-314-	10 Mei 2011

				Dishubkominfo/2011	
		16.	Kab. Sumedang		
		17.	Kab. Tasikmalaya	042/Kep.113-Hms/2013	11 Maret 2013
		18.	Kota Bandung	065.1/Kep.853-Diskominfo/2011	9 Nopember 2011
		19.	Kota Banjar	045/Kpts. 14-Dishubkominpar/2012	27 Januari 2012
		20.	Kota Bekasi	480/Kep.448-A-Humas/X/2010	18 Oktober 2010
		21.	Kota Bogor	487.45-215	23 Mei 2011
		22.	Kota Cimahi	488/Kep.85-HMS/2011	2 Februari 2012
		23.	Kota Cirebon	Perwalkot 41 Tahun 2012	26 Juli 2012
		24.	Kota Depok	555/176/Kpts/Diskominfo/Huk/2011	14 Maret 2011
		25.	Kota Sukabumi	160 Tahun 2011	8 Agustus 2011
		26.	Kota Tasikmalaya	042/Kep.113-Hms/2013	11 Maret 2013
12	Banten			499.05/Kep.673-Huk/2011	1 Januari 2011
		1.	Kab. Tangerang	042/Kep.481-Huk/2011	28 Agustus 2011
		2.	Kab. Serang	130/Kep-370-Org/2011	4 Agustus 2011.
		3.	Kab. Lebak	13 Th.2011	8 April 2011
		4.	Kab. Pandeglang	Peraturan Bupati No : 25 Tahun 2011	29 Juli 2011
		5.	Kota Tangerang	800/Kep.84-Infokom/2011	30 Juni 2011
		6.	Kota Serang	042/Kep.28-Huk/2012	6 Februari 2012.
		7.	Kota Cilegon	060.05/Kep.562-Org/2012	28 Desember 2013
		8.	Kota Tangerang Selatan	043.3/Kep.105-Huk/2012	15 Mei 2012
13	DKI Jakarta			579/2011	18 April 2011
		1.	Kab. Kepulauan Seribu		
		2.	Kota Jakarta Barat		
		3.	Kota Jakarta Pusat		
		4.	Kota Jakarta Selatan		
		5.	Kota Jakarta Timur		
		6.	Kota Jakarta Utara		
14	Jawa Tengah			550/52/2011	22Agustus 2011
		1.	Kab. Banjarnegara	8 Tahun 2011	18 Februari 2011

		2.	Kab. Banyumas	480/1387/2010	13 Oktober 2010
		3.	Kab. Batang	485.2/107/2011	7 Maret 2011
		4.	Kab. Blora	040/245/2013	25 April 2013
		5.	Kab. Boyolali	040/14 Tahun 2013	9 Januari 2013
		6.	Kab. Brebes	590/464 Tahun 2011	29 Juli 2011
		7.	Kab. Cilacap	555/456 Tahun 2011	11 Agustus 2011
		8.	Kab. Demak	Perbup 31 Tahun 2011	25 Oktober 2011
		9.	Kab. Grobogan	489/922/2011	18 Agustus 2011
		10.	Kab. Jepara	155 Tahun 2011	10 Mei 201
		11.	Kab. Karanganyar	042/153 Tahun 2011	17 Januari 2011
		12.	Kab. Kebumen	487.231	2 Agustus 2010
		13.	Kab. Kendal	180/325/2011	7 Juni 2011
		14.	Kab. Klaten	18/29/2011	22 Juli 2011
		15.	Kab. Kudus	488/116.1/2012	30 April 2012
		16.	Kab. Magelang	188.45/229/KEP/32/2012	5 Juni 2012
		17.	Kab. Pati	37 Tahun 2010	11 Agustus 2010
		18.	Kab. Pekalongan	060/175	13 Juni 2011
		19.	Kab. Pemalang	188.4/197/ Tahun 2011	7 September 2011
		20.	Kab. Purbalingga	550/275 Tahun 2011	2 Agustus 2011
		21.	Kab. Purworejo	188.4/102/II/2011	22 Februari 2011
		22.	Kab. Rembang	555/1009/2011	3 Agustus 2011
		23.	Kab. Semarang	117/0381/2011	14 Juli 2011
		24.	Kab. Sragen	485.2/162/002/2010	12 Oktober 2010
		25.	Kab. Sukoharjo	042/329/2012	22 Maret 2012
		26.	Kab. Tegal	060/465/2011	19 Agustus 2011
		27.	Kab. Temanggung	555/456 Tahun 2011	20 Agustus 2011
		28.	Kab. Wonogiri	227 Tahun 2013	
		29.	Kab. Wonosobo	1276/ 2011	6 Agustus 2011
		30.	Kota Magelang	042/27/112 Tahun 2011	11 Agustus 2011
		31.	Kota Pekalongan	550/42 Tahun 2011	27 Juni 2011
		32.	Kota Salatiga	Perwalkot 28 Thn 2011	1 Juni 2011
		33.	Kota Semarang	480/219/2011	19 Juli 2012
		34.	Kota Surakarta	042.05/01-B/I/2011	3 Januari 2011
		35.	Kota Tegal	6 Tahun 2013	28 Maret 2013
15	D I Yogyakarta			338/KEP/2010	28 Desember 2010
		1.	Kab. Bantul	205 A Tahun 2011	10 Agustus 2011
		2.	Kab. Gunung Kidul	303/KPTS/2012	5 Oktober 2012
		3.	Kab. Kulon Progo	243 Tahun 2011	12 Juli 2011
		4.	Kab. Sleman	234/Kep.KDH/A/2013	18 Juli 2013
		5.	Kota Yogyakarta	497/Kep/2011	5 Agustus 2011

16	Jawa Timur			188/415/KPTS/013/2011	2 Agustus 2011
		1.	Kab. Bangkalan	188.45/47/Kpts/433.013/2011	24 Februari 2011
		2.	Kab. Banyuwangi	Perbup No : 19 Tahun 2012	tgl 25 Juni 2012
		3.	Kab. Blitar	188/261/409.012/KPTSA/2011	2 Juli 2011
		4.	Kab. Bojonegoro	188/54/KEP/412.11/2011	4 Pebruari 2011
		5.	Kab. Bondowoso		
		6.	Kab. Gresik	019/441/HK/437.12/2011	11 Agustus 2011
		7.	Kab. Jember		
		8.	Kab. Jombang	188.4.45/167/415.10.10/2012	8 Juni 2012
		9.	Kab. Kediri		
		10.	Kab. Lamongan		
		11.	Kab. Lumajang		
		12.	Kab. Madiun	188.45/447/KPTS/402.031/2011	6 Juni 2011
		13.	Kab. Magetan		
		14.	Kab. Malang	180/589/KEP/421.013/2012	28 September 2012
		15.	Kab. Mojokerto	188.45/356/HK/416-012/2011	15 Juli 2011
		16.	Kab. Nganjuk		
		17.	Kab. Ngawi	188/35.3/404.012/2012	19 Januari 2012
		18.	Kab. Pacitan	188.45/464/KPTS/408.21/2013	4 Juni 2013
		19.	Kab. Pamekasan	24 Tahun 2013	7 Oktober2013
		20.	Kab. Pasuruan		
		21.	Kab. Ponorogo		
		22.	Kab. Probolinggo		
		23.	Kab. Sampang	188/144/KEP/434.013/2011	8 April 2011
		24.	Kab. Sidoarjo	188/609/404.1.3.2/2012	4 Juni 2012
		25.	Kab. Situbondo	188/454/P/004.2/2014	24 Juli 2013
		26.	Kab. Sumenep	188/100/KEP/435.013/2012	27 Februari 2012
		27.	Kab. Trenggalek	188.45/318/406.004/2013	20 Februari 2013
		28.	Kab. Tuban	188.45/122/KPTS/414.012/2012	23 Juli 2012
		29.	Kab. Tulungagung		
		30.	Kota Batu	Perwalkot 28 Tahun 2011	
		31.	Kota Blitar	188/261/409.012/KPTSA/2011	2 Juli 2011
		32.	Kota Kediri	188.45/235/419.16/2013	10 Juni 2013
		33.	Kota Madiun		
		34.	Kota Malang	188.45/174/35.73.112/2011	30 Mei 2011
		35.	Kota Mojokerto	188.45/608/417.111/201	11 Mei 2012

				2	
		36.	Kota Pasuruan	188/296/423.031/2013	3 April 2013
		37.	Kota Probolinggo	188.45/14/KEP/425.012/2012	18 Januari 2012
		38.	Kota Surabaya	188.45/4/436.1.2/2011	17 Januari 2011
17	Kalimantan Barat			109/HUMPRO/2013	28 Januari 2013
		1.	Kab. Bengkayang	187/SETDA/TAHUN 2013	7 Mei 2013
		2.	Kab. Kapuas Hulu	369/HUMASPRO.TAHUN 2013	
		3.	Kab. Kayong Utara		
		4.	Kab. Ketapang		
		5.	Kab. Kubu Raya	229/SETDA/2013	25 Juni 2013
		6.	Kab. Landak		
		7.	Kab. Melawi	550/19 TAHUN 2013	6 Februari 2013
		8.	Kab. Pontianak		
		9.	Kab. Sambas	180 TAHUN 2012	5 Juni 2012
		10.	Kab. Sanggau		
		11.	Kab. Sekadau		
		12.	Kab. Sintang		
		13.	Kota Pontianak	(Ada Minta Emi)	
		14.	Kota Singkawang	Perwalkot 15 TAHUN 2012	tgl. 13 Juni 2012
18	Kalimantan Tengah			188.44/172/2013	15 Maret 2013
		1.	Kab. Barito Selatan	103 Tahun 2013	12 Pebruari 2013
		2.	Kab. Barito Timur		
		3.	Kab. Barito Utara		
		4.	Kab. Gunung Mas	489/696/Hms/VII/2011	18 Juli 2011
		5.	Kab. Kapuas	265/ORG.TAHUN 2011	20 Juli 2011
		6.	Kab. Katingan	042/212/BU/X/2013	17 Oktober 2013
		7.	Kab. Kotawaringin Barat		
		8.	Kab. Kotawaringin Timur	129/ Tahun 2012	30 April 2012
		9.	Kab. Lamandau		
		10.	Kab. Murung Raya		
		11.	Kab. Pulang Pisau		
		12.	Kab. Sukamara		
		13.	Kab. Seruyan		
		14.	Kota Palangkaraya	270 Tahun 2010	27 Desember 2010

19	Kalimantan Selatan			188.44/0239/KUM/2014	6 Mei 2014
		1.	Kab. Balangan		
		2.	Kab. Banjar	402 Tahun 2011	4 Agustus 2011
		3.	Kab. Barito Kuala		
		4.	Kab. Hulu Sungai Selatan	200 Tahun 2011	24 Juni 2011
		5.	Kab. Hulu Sungai Tengah		
		6.	Kab. Hulu Sungai Utara		
		7.	Kab. Kotabaru		
		8.	Kab. Tabalong	188.45/184/2014	27 Maret 2014
		9.	Kab. Tanah Bumbu	188.45/432/DISHUBKOMI NFO/2012	5 Nopember 2012
		10.	Kab. Tanah Laut		
		11.	Kab. Tapin		
		12.	Kota Banjarbaru	188.4.45/330/KUM/2013	6 September 2013
		13.	Kota Banjarmasin		
20	Kalimantan Timur			042/K.208/2013	5 Maret 2013
		1.	Kab. Berau	564 Tahun 2012	6 Nopember 2012
		2.	Kab. Kutai Barat		
		3.	Kab. Kutai Kartanegara	734/SK-Bup/HK/2012	16 Oktober 2012
		4.	Kab. Kutai Timur	488/K.121/2013	8 Februari 2013
		5.	Kab. Paser	478/KEP-789/2013	12 Desember 2013
		6.	Kab. Penajam Paser Utara	042/23/2012	14 Februari 2012
		7.	Kota Balikpapan	188.45-171/2011	12 Mei 2011
		8.	Kota Bontang	426 Tahun 2012	12 Oktober 2012
		9.	Kota Samarinda	040/008/HKKS/I/2013	11 Januari 2013
21	Kalimantan Utara				
		1.	Kab. Bulungan	501/K-VIII/550/2013	1 Agustus 2013
		2.	Kab. Tanah Tidung		
		3.	Kab. Malinau		
		4.	Kab. Nunukan	188.45/182/II/2013	7 Februari 2013
		5.	Kota Tarakan	480/HK-I/13/2012	16 Januari 2013
22	Sulawesi Selatan			13 Tahun 2013	1 Mei 2013
		1.	Kab. Bantaeng		

		2.	Kab. Barru		
		3.	Kab. Bone		
		4.	Kab. Bulukumba	369/VII/2011	18 Juli 2011
		5.	Kab. Enrekang		
		6.	Kab. Gowa		
		7.	Kab. Jeneponto		
		8.	Kab. Kepulauan Selayar	764/X/Tahun 2013	16 Oktober 2013
		9.	Kab. Luwu	106/II/2013	18 Februari 2013
		10.	Kab. Luwu Timur		
		11.	Kab. Luwu Utara	188.4.45/215/VIII/2011	18 Agustus 2011
		12.	Kab. Maros	400/KPTS/456	4 Juni 2013
		13.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	228 Tahun 2011	16 Juni 2011
		14.	Kab. Pinrang		
		15.	Kab. Sidenreng Rappang		
		16.	Kab. Sinjai	17 Tahun 2011	11 Juli 2011
		17.	Kab. Soppeng		
		18.	Kab. Takalar		
		19.	Kab. Tana Toraja	736/V/2011	5 Mei 2011
		20.	Kab. Toraja Utara		
		21.	Kab. Wajo		
		22.	Kota Makassar		
		23.	Kota Palopo	573/X/2013	18 Oktober 2013
		24.	Kota Parepare	45 Tahun 2011	20 Juni 2011
23	Sulawesi Barat			389 Tahun 2012	16 Agustus 2012
		1.	Kab. Majene		
		2.	Kab. Mamasa		
		3.	Kab. Mamuju	188.45/23/KPTS/I/2012	18 Januari 2012
		4.	Kab. Mamuju Utara		
		5.	Kab. Polewali Mandar	33 Tahun 2012	26 Januari 2012
24	Sulawesi Tenggara				
		1.	Kab. Bombana		
		2.	Kab. Buton	705 Tahun 2013	24 September 2013
		3.	Kab. Buton Utara		
		4.	Kab. Kolaka		
		5.	Kab. Kolaka Utara		
		6.	Kab. Konawe		
		7.	Kab. Konawe Selatan		
		8.	Kab. Konawe Utara		
		9.	Kab. Muna	340 Tahun 2011	16 Agustus 2011

		10.	Kab. Wakatobi		
		11.	Kota Bau-Bau		
		12.	Kota Kendari		
25	Sulawesi Tengah			550/29/DISHUBKOMINFO -GST/2011.	13 Juni 2011
		1.	Kab. Banggai		
		2.	Kab. Banggai Kepulauan		
		3.	Kab. Buol	910/8109/BAG.HUMAS/2 013	1 Oktober 2013
		4.	Kab. Donggala	188.45/0531/Bag.Humas/ 2013	1 Oktober 2013
		5.	Kab. Morowali		
		6.	Kab. Parigi Moutong	042.45/2163/Bag. Humas	17 Oktober 2013
		7.	Kab. Poso	188.45/2118/2013	21 OKTOBER 2013
		8.	Kab. Tojo Una-Una		
		9.	Kab. Toli-Toli	223 Tahun 2011	20 Juli 2011
		10.	Kab. Sigi		
		11.	Kota Palu	491/768/HUMAS/2013	
26	Gorontalo			113/05/III/2011	10 Maret 2011
		1.	Kab. Boalemo		
		2.	Kab. Bone Bolango		
		3.	Kab. Gorontalo		
		4.	Kab. Gorontalo Utara		
		5.	Kab. Pohuwato		
		6.	Kota Gorontalo		
27	Sulawesi Utara			232 Tahun 2011	31 Oktober 2011
		1.	Kab. Bolaang Mongondow		
		2.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		
		3.	Kab. Bolaang Mongondow Timur		
		4.	Kab. Bolaang Mongondow Utara		
		5.	Kab. Kepulauan Sangihe		
		6.	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
		7.	Kab. Kepulauan Talaud		

		8.	Kab. Minahasa		
		9.	Kab. Minahasa Selatan		
		10.	Kab. Minahasa Tenggara		
		11.	Kab. Minahasa Utara		
		12.	Kota Bitung	188.45/HKM/SK/50/2014	29 Januari 2014
		13.	Kota Kotamobagu		
		14.	Kota Manado	042/008/KOMINFO/330/2011	1 Juni 2011
		15.	Kota Tomohon		
28	Bali			47 Tahun 2013	6 November 2013
		1.	Kab. Badung	1939/01/HK/2011	13 September 2011
		2.	Kab. Bangli	550/180/2011	17 Nopember 2011
		3.	Kab. Buleleng	042/2295/HK/2012	4 Desember 2012
		4.	Kab. Gianyar	1100/05-F/HK/2011	4 Agustus 2011
		5.	Kab. Jembrana	419/HUBKOMINFO/2012	5 September 2012
		6.	Kab. Karangasem	Perbup 29 Tahun 2011	1 Juli 2011
		7.	Kab. Klungkung		
		8.	Kab. Tabanan	215 TAHUN 2011	22 Juni 2011
		9.	Kota Denpasar	188.45/647/HK/2012	3 Oktober 2012
29	Nusa Tenggara Barat			667 Tahun 2012	14 Desember 2012
		1.	Kab. Bima	188.45/745/01.5/2013	22 Juni 2013
		2.	Kab. Dompu	422 Tahun 2012	5 September 2012
		3.	Kab. Lombok Barat	820/29A/DISHUBKOMINFO/2013	16 Januari 2013
		4.	Kab. Lombok Tengah		
		5.	Kab. Lombok Timur	188.45/267/HUBKOMINFO/2013	11 Juni 2013
		6.	Kab. Lombok Utara	259/228/DISHUB/2013	24 April 2013
		7.	Kab. Sumbawa	1165 Tahun 2012	21 September 2012
		8.	Kab. Sumbawa Barat	765 Tahun 2013	26 Agustus 2013
		9.	Kota Bima	439 Tahun 2013	6 Desember 2013
		10.	Kota Mataram		
30	Nusa Tenggara Timur			35/KEP/HK/2013	18 Februari 2013
		1.	Kab. Alor		
		2.	Kab. Belu		
		3.	Kab. Ende		

		4.	Kab. Flores Timur	2 /188.4.45/2013	3 Januari 2013
		5.	Kab. Kupang		
		6.	Kab. Lembata		
		7.	Kab. Manggarai		
		8.	Kab. Manggarai Barat		
		9.	Kab. Manggarai Timur		
		10.	Kab. Ngada		
		11.	Kab. Nagekeo		
		12.	Kab. Rote Ndao		
		13.	Kab. Sabu Raijua		
		14.	Kab. Sikka		
		15.	Kab. Sumba Barat	194/KEP/HK/2013	23 April 2013
		16.	Kab. Sumba Barat Daya	194/KEP/HK/2013	23 April 2013
		17.	Kab. Sumba Tengah		
		18.	Kab. Sumba Timur		
		19.	Kab. Timor Tengah Selatan		
		20.	Kab. Timor Tengah Utara	121 Tahun 2013	15 Mei 2013
		21.	Kota Kupang	 /Tahun 2013	5 Desember 2013
31	Maluku				
		1.	Kab. Buru		
		2.	Kab. Buru Selatan		
		3.	Kab. Kepulauan Aru		
		4.	Kab. Maulu Barat Daya		
		5.	Kab. Maluku Tengah		
		6.	Kab. Maluku Tenggara		
		7.	Kab. Maluku Tenggara Barat		
		8.	Kab. Seram Bagian Barat		
		9.	Kab. Seram Bagian Timur		
		10.	Kota Ambon	24 Tahun 2013	7 Januari 2013
		11.	Kota Tual		
32	Maluku Utara				
		1.	Kab. Halmahera Barat		
		2.	Kab. Halmahera Tengah		
		3.	Kab. Halmahera Utara		
		4.	Kab. Halmahera Selatan	49 Tahun 2013	4 Maret 2013

		5.	Kab. Kepulauan Sula		
		6.	Kab. Halmahera Timur		
		7.	Kab. Pulau Morotai		
		8.	Kota Ternate		
		9.	Kota Tidore Kepulauan	59.2 Tahun 2011	22 Agustus 2011
33	Papua Barat			480/248/12/2012 Tahun 2012	6 Desember 2012
		1.	Kab. Fakfak	480-141 Tahun 2012	17 Juli 2012
		2.	Kab. Kaimana		
		3.	Kab. Manokwari	201 Tahun 2012	3 Juli 2012
		4.	Kab. Maybrat		
		5.	Kab. Raja Ampat	182 Tahun 2012	
		6.	Kab. Sorong		
		7.	Kab. Sorong Selatan	480/108/BSS/II/Tahun 2013	
		8.	Kab. Tambrau		
		9.	Kab. Teluk Bintuni		
		10.	Kab. Teluk Wondama		
		11.	Kota Sorong		
34	Papua			158 Tahun 2011	10 November 2011
		1.	Kab. Asmat		
		2.	Kab. Biak Numfor		
		3.	Kab. Boven Digoel	800/258/BUP/2011	19 Agustus 2011
		4.	Kab. Deiyai		
		5.	Kab. Dogiyai		
		6.	Kab. Intan Jaya		
		7.	Kab. Jayapura		
		8.	Kab. Jayawijaya		
		9.	Kab. Keerom	105 Tahun 2013	28 Nopember 2012
		10.	Kab. Kepulauan Yapen		
		11.	Kab. Lanny Jaya		
		12.	Kab. Mamberamo Raya		
		13.	Kab. Mamberamo Tengah		
		14.	Kab. Mappi		
		15.	Kab. Merauke	586 Tahun 2012	18 Desember 2012
		16.	Kab. Mimika		
		17.	Kab. Nabire		
		18.	Kab. Nduga		

		19.	Kab. Paniai		
		20.	Kab. Pegunungan Bintang	4 Tahun 2013	21 Maret 2013
		21.	Kab. Puncak		
		22.	Kab. Puncak Jaya		
		23.	Kab. Sarmi		
		24.	Kab. Supiori		
		25.	Kab. Tolikara		
		26.	Kab. Waropen		
		27.	Kab. Yahukimo		
		28.	Kab. Yalimo		
		29.	Kota Jayapura		

Catatan :

Tulisan yang tercetak biru, SK nya tidak terlampir (data Kemendagri)

**KOMISI INFORMASI PROVINSI & KAB./KOTA YANG SUDAH
TERBENTUK**

Provinsi	Dalam Proses
1. Jawa Tengah 2. Jawa Timur 3. Kepulauan Riau 4. Gorontalo 5. Lampung 6. Banten 7. Sulawesi Selatan 8. Jawa Barat 9. Sumatera Selatan 10. Kalimantan Tengah 11. DKI Jakarta 12. Daerah Istimewa Yogyakarta 13. NTB 14. Sulawesi Utara 15. Kalimantan Timur 16. Bali 17. Aceh 18. Medan 19. Sulawesi Tengah (Palu) 20. Riau 21. Jambi 22. Babel 23. Bengkulu	1. Papua 2. Kalsel
Kab./Kota	
1. Kab. Bangkalan 2. Kota Cirebon 3. Kab. Sumenep	

